

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Gerakan Lingkungan sebagai Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan sekelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada. Dalam sosiologi, gerakan tersebut diklasifikasikan sebagai suatu bentuk perilaku kolektif tertentu yang diberi nama gerakan sosial. Gerakan sosial lahir dari situasi dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat. Dengan kata lain, gerakan sosial lahir dari reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil.

Menurut Macionis (1999: 607) sebagaimana dikutip oleh Sukmana (2016: 1) mengatakan bahwa gerakan sosial (*social movement*) merupakan tipe paling penting dari perilaku kolektif (*collective behavior*), serta gerakan sosial adalah aktivitas yang diorganisasikan yang ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial. Beberapa sosiolog menyebut gerakan sosial lebih sebagai suatu bentuk dari tindakan kolektif (*collective action*) daripada bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*). Mengacu pada konsep Olson, inti dari konsep tindakan kolektif adalah

adanya kepentingan umum atau kepentingan bersama (*public goods*) yang diusung diantara kelompok (Sukamana, 2016: 1-2).

Tahap-tahap dalam gerakan sosial menurut Macdonald sebagaimana dikutip oleh Sukmana (2016: 26) yaitu:

a. *Emergence* (tahap kemunculan)

Gerakan sosial didorong oleh suatu persepsi bahwa segalanya tidak baik (*all is not well*).

b. *Coalescence* (tahap penggabungan)

Setelah kemunculan, suatu gerakan sosial harus mendefinisikan dirinya sendiri dan mengembangkan strategi untuk “menuju publik” (*going public*). Gerakan juga dimungkinkan membentuk aliansi dengan organisasi yang lainnya untuk mendapatkan sumberdaya yang diperlukan.

c. *Bureaucratization* (tahap birokrasi)

Agar menjadi sebuah kekuatan politik (*a political force*), suatu gerakan sosial harus memiliki sifat-sifat birokrasi. Dengan demikian, gerakan akan menjadi mapan, ketergantungan terhadap karisma pemimpin akan sedikit menurun karena akan digantikan oleh staf yang mumpuni. Apabila suatu gerakan sosial tidak menjadi mapan, maka akan beresiko mudah hilang.

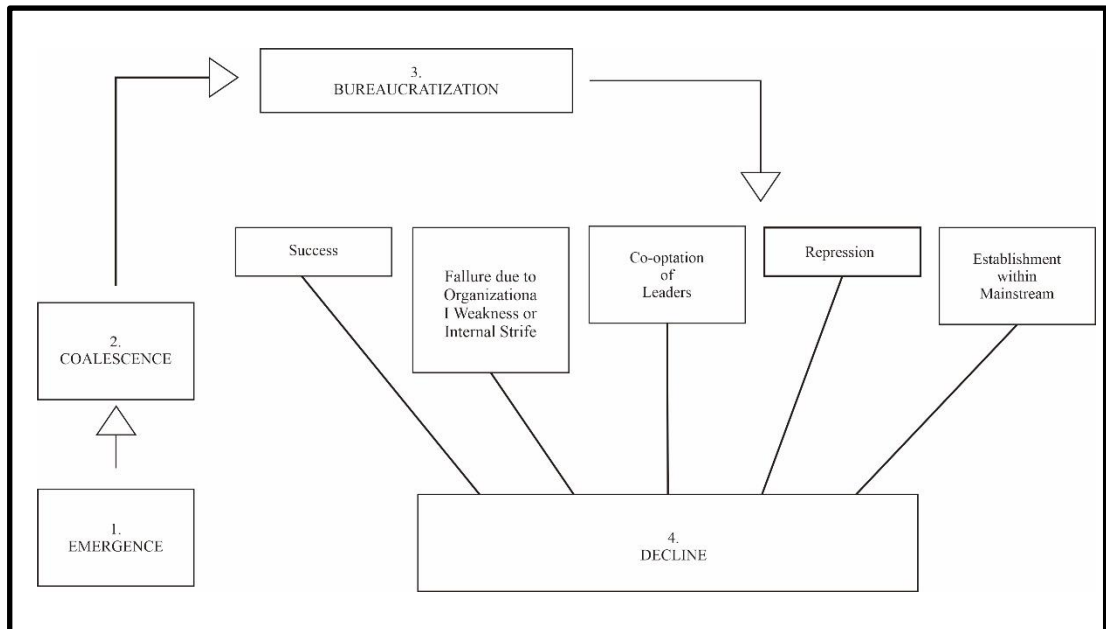
d. *Decline* (tahap kemunduran/penurunan)

Pada akhirnya, suatu gerakan sosial akan kehilangan pengaruhnya. Ada lima alasan mengapa suatu gerakan sosial mengalami kemunduran, yaitu :

- 1) Aktivitas suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena dianggap telah berhasil dalam mencapai tujuannya (*success*);
- 2) Suatu gerakan sosial mengalami kegagalan karena adanya kelemahan atau pertentangan dalam internal organisasi (*failure due to organizational weakness or internal strife*);
- 3) Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya kooptasi atas para pemimpin gerakan (*cooptation of leaders*);
- 4) Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya tekanan (*repression*), terutama dari pihak eksternal; dan
- 5) Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena gerakan tersebut terbentuk ke dalam pengarusutamaan (*establishment within mainstream*). Beberapa gerakan dapat diterima ke dalam bagian dari suatu sistem, sehingga tidak ada tantangan atas *status quo*.

Selanjutnya tahap-tahap gerakan sosial tersebut digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 2.1.
Stages in the lives of social movements
(Tahap-Tahap dalam Kehidupan Gerakan Sosial)



Sumber: Sukmana, 2016: 26

Beberapa karakteristik dari gerakan sosial menurut Greene sebagaimana dikutip oleh Sukmana (2016: 5), meliputi:

- a. sejumlah orang,
- b. tujuan umum untuk mendukung atau mencegah suatu perubahan sosial,
- c. adanya struktur dengan kepemimpinan yang diakui umum, dan adanya suatu aktivitas yang dipertahankan dalam waktu yang cukup lama. Gerakan sosial relatif lebih permanen dan terorganisir dibandingkan dari tipe perilaku kolektif yang lainnya.

Menurut Sztompka dalam Nanang Martono (2011: 230) menyatakan bahwa ada beberapa bentuk atau klasifikasi gerakan sosial. Klasifikasi tersebut didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: pertama, menurut bidang perubahan yang diinginkan. Kedua, menurut kualitas perubahan yang diinginkan. Ketiga, menurut target perubahan. Keempat, menurut arah perubahan yang diinginkan. Kelima, menurut strategi yang mendasari atau “logika tindakan mereka”. Keenam, menurut sejarah perkembangannya. Menurut Rahmadi (2014: 1-3) dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau berkurangnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).

Dalam Nanang Martono (2011: 228-229) menyebutkan bahwa pada semua masyarakat modern, selalu saja terdapat kadar ketidakpuasan yang mana kondisi ketidakpuasan itu sendiri belum cukup untuk membangkitkan munculnya gerakan sosial. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan dalam Rahmadi (2014: 35-56) bahwa menurut libertarianisme hukum lingkungan harus mewajibkan para pelaku untuk terus menerus meminimalisasi tingkat pencemaran atau kerusakan lingkungan dan kemudian meniadakan sama sekali pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong lahirnya inovasi teknologi pencegah pencemaran (*technology-forcing pollution control legislation*).

Berdasarkan dimensi sasaran perubahan dan dimensi jumlah besarnya tingkat perubahan, menurut Macionis (1999) dan Locher (2002) sebagaimana dikutip oleh Sukmana (2016: 16) maka gerakan sosial dapat dikelompokkan ke dalam empat tipe, yakni :

- a. Gerakan Sosial Alternatif, yaitu gerakan sosial yang tingkat ancaman terhadap *status quo* sangat kecil karena sasaran dari gerakan sosial ini adalah suatu perubahan yang terbatas terhadap hanya sebagian dari populasi.
- b. Gerakan Sosial Pembebasan, yaitu suatu tipe gerakan sosial yang memiliki fokus selektif, tetapi ditujukan terhadap perubahan yang radikal (lebih mengakar) pada individu.
- c. Gerakan Sosial Reformasi, yaitu tipe gerakan sosial yang ditujukan hanya untuk suatu perubahan sosial yang terbatas terhadap setiap orang. Tipe gerakan ini umumnya terjadi dalam suatu sistem politik yang bisa bersifat progresif (mempromosikan pola sosial yang baru) dan bisa bersifat reaktif (*counter movement* yang mencoba mempertahankan *status quo*).
- d. Gerakan Sosial Revolusi, merupakan suatu tipe gerakan sosial yang paling keras (ekstrim) dibandingkan tipe gerakan sosial yang lainnya, berjuang untuk sebuah transformasi dasar dari seluruh masyarakat.

Gerakan lingkungan adalah bagian dari gerakan sosial baru (GSB) yang merupakan perluasan dari gerakan sosial lama atau klasik. gerakan

sosial baru mulai menguat paruh abad ke 20 dan mengacu pada sebuah definisi tentang bagaimana memperkuat hak-hak masyarakat sipil. Isu yang diusung lebih luas menyangkut misalnya gerakan feminis, gerakan lingkungan, gerakan anti-nuklir, gerakan anti-globalisasi, dan lain-lain. Aktor-aktor yang terlibat pun lebih luas, lintas-kelas, lintas-agama, lintas-wilayah, dan lain-lain. Menurut Puthut EA sebagaimana dikutip oleh Nugroho (2015: 130) menyatakan bahwa isu pokok dari gerakan sosial baru lebih menekankan pada dua hal, yaitu otonomi dan identitas. Gerakan sosial baru dibedakan dari gerakan kelompok kepentingan yang hanya merepresentasikan kelompok kecil dalam memperjuangkan kepentingan sempit, dan juga berbeda dari gerakan politik, seperti partai politik yang bertujuan pada transformasi sosial melalui proses politik. Gerakan sosial baru ini misalnya adalah gerakan kaum feminis, pembela lingkungan, dan kulit hitam (Nugroho, 2015: 130).

Menurut Macionis (1999: 622) sebagaimana dikutip oleh Sukmana (2016: 123) menyebutkan bahwa karakteristik dari gerakan sosial baru meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. **pertama**, sebagai suatu proses dari globalisasi yang menghubungkan negara-negara di dunia yang menyebabkan gerakan sosial menjadi fenomena global seperti persoalan ekologi global, kedudukan sosial dari kaum wanita dan gay, hak-hak binatang dan pengurangan resiko perang.

- b. **Kedua**, gerakan sosial baru cenderung memfokuskan kepada perubahan kultural dan perbaikan lingkungan sosial dan fisik.
- c. **Ketiga**, gerakan sosial baru umumnya mendapat dukungan golongan kelas menengah.

Untuk dapat melakukan suatu gerakan lingkungan, diperlukan suatu pemahaman mengenai pendidikan lingkungan itu sendiri. Pendidikan lingkungan hidup menurut Nugroho (2017: 114) sebagaimana mengutip dari UNESCO pada Deklarasi Tbilisi tahun 1977 adalah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total (keseluruhan) dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu maupun kolektif/ kelompok, untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini, dan mencegah timbulnya masalah baru. Pendidikan lingkungan sendiri mencakup lima komponen utama, yaitu:

- a. Kesadaran dan kepekaan lingkungan dan tantangan lingkungan;
- b. Pengetahuan dan pemahaman terhadap lingkungan dan tantangan lingkungan;
- c. Sikap peduli terhadap lingkungan dan motivasi untuk memperbaiki atau memelihara kualitas lingkungan;
- d. Keahlian untuk mengidentifikasi dan membantu menghadapi tantangan lingkungan; serta

- e. Partisipasi dalam aktivitas yang mengarah ke resolusi terhadap tantangan lingkungan.

Menurut Nomura dan Hendarti (2005) sebagaimana dikutip oleh Nugroh (2017: 114), mengatakan bahwa pendidikan lingkungan dapat disampaikan melalui tiga tipe cara yaitu:

- a. Pertama, pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk itu.
- b. Kedua, pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang diorganisasikan tidak melalui sekolah formal atau pelebagaan. Contohnya yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan keahlian diajarkan oleh keluarga, teman, atau anggota suatu komunitas. Secara umum, pendidikan non-formal biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi non pemerintahan (NGO) yang peduli pada lingkungan.
- c. Ketiga, pendidikan informal yaitu pendidikan sehari-hari dan terus menerus dari pengalaman hidup di luar pendidikan formal dan non-formal yang terorganisasikan. Ini mencakup pembelajaran dalam keluarga, tempat kerja, dan kehidupan sosial.

Dengan pendidikan lingkungan, gerakan sosial lingkungan akan terlaksana dengan menekankan pada pengelolaan lingkungan hidup. Yang mana pengelolaan lingkungan adalah usaha secara sadar untuk memelihara dan atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar manusia dapat

terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Usaha tersebut merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan.

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan antara lain:

- a. Pemeliharaan lingkungan secara terus-menerus;
- b. Perencanaan awal untuk memperbaiki lingkungan suatu daerah menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan;
- c. Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan, misalnya sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan;
- d. Penelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun tindakan manusia (Irianto, 2014: 73-74).

Faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu faktor alam dan faktor manusia.

- a. Kerusakan lingkungan hidup akibat faktor alam, yaitu peristiwa alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain: letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, angin topan, longsor, dan lain sebagainya.
- b. Kerusakan lingkungan hidup akibat faktor manusia, yaitu manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi mempunyai peran yang sangat besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup, yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran

akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Manusia merupakan salah satu kategori faktor yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Beberapa perilaku manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yaitu antara lain: memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan; industrialisasi yang menyebabkan pencemaran udara, pencemaran air, dan kebisingan; penggunaan alat transportasi yang dapat menyebabkan polusi; dan membuang sampah sembarangan.

Kesempatan berperan serta dalam pengelolaan lingkungan dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut, diantaranya:

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. Menumbuhkan ketangguhan dan kesegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. Memberikan saran dan pendapat;
 - e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan
- (Rusdiana, 2012: 141).

2. Partisipasi Masyarakat

Secara etimologis, istilah partisipasi berasal dari bahasa latin "*pars*" yang artinya bagian, berarti mengambil bagian atau dapat juga disebut "peran serta" atau "keikutsertaan". Arti kata partisipasi berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai turut berperan serta dalam suatu

kegiatan. Pengertian ini menekankan pada keikutsertaan. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental, emosional, dan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya (Hidayat, 2015: 6). Definisi tersebut menekankan bahwa partisipasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta lebih menekankan pada aspek psikologis yang mendorong seseorang atau kelompok orang untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka terdapat tiga unsur partisipasi, yaitu adanya tanggung jawab, kesediaan memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok, dan kesediaan terlibat di dalam kelompok. Maka, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada dasarnya merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuangan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah, atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Tidak semua partisipasi ada atas kesadaran dan inisiatif warga masyarakat tetapi juga bisa merupakan mobilisasi dari atas untuk mencapai tujuan.

Menurut Uphoff, Cohen, dan Goldsmith sebagaimana dikutip oleh Sulistiyorini, Darwis, & Gutama (2015) partisipasi dibagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu:

- a. Tahap perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang merencanakan program

pembangunan yang akan dilaksanakan, serta menyusun rencana kerjanya.

- b. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam program, inti dari keberhasilan suatu program adalah pelaksanaan. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota.
- c. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program.
- d. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.
Perbandingan penelitian terdahulu

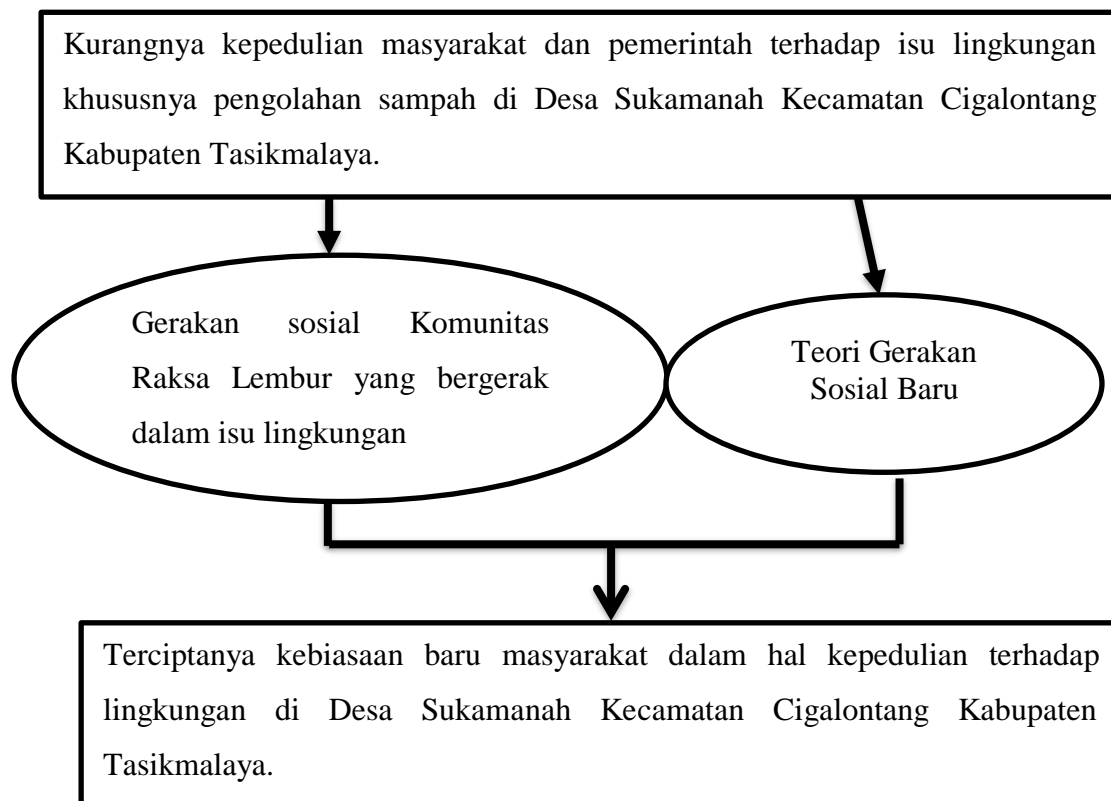
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Subjek Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Eko Aji Wahyudin	Gerakan Sosial Baru Dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi WALHI Terhadap Ruang Terbuka	Pada penelitian ini, WALHI dalam konteks gerakan sosial dikategorikan sebagai aktor Gerakan Sosial	Penelitian ini membahas isu lingkungan yang terjadi di perkotaan.	Persamaannya yaitu membahas gerakan sosial lingkungan yang dipicu oleh masalah

		Hijau di DKI Jakarta 2004-2017).	Baru karena gerakan-gerakan yang dilakukan untuk memperjuangkan isu lingkungan yang merupakan tergolong dalam isu-isu kontemporer dalam khasanah kajian gerakan sosial. Mengemas keluhan-keluhan seperti banjir, dan krisis air menjadi salah satu latar belakang untuk memperjuangkan Ruang Terbuka Hijau sebagai salah satu solusi untuk	sampah.
--	--	----------------------------------	--	---------

			mengurangi dampak degradasi lingkungan di Jakarta		
2.	Adityo Nugroho (2015)	Geliat Organisasi Pemuda Lingkungan (OPL) dalam Ranah Gerakan Lingkungan di Yogyakarta.	penelitian menunjukkan bahwa organisasi pemuda lingkungan di Yogyakarta telah mampu menempatkan diri sebagai salah satu aktor penting upaya kepedulian lingkungan. Dengan semua keterbatasan yang ada mereka mampu bergerak sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk turut berpartisipasi	Penelitian ini berfokus untuk menunjukkan bahwa generasi muda di Yogyakarta dapat melakukan hal-hal positif.	Persamaannya yaitu membahas mengenai pentingnya peran pemuda dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bertajuk lingkungan.

			<p>dalam gerakan lingkungan. Gerakan lingkungan yang tercermin dalam aksi-aksi nyata mereka telah memberikan bukti bahwa kaum muda merupakan generasi yang mampu melakukan kegiatan-kegiatan positif. Aksi-aksi yang dilakukan pemuda dalam wadah OPL ini tentunya dapat menghapus stigma negatif yang selama ini disematkan pada generasi muda.</p>		
--	--	--	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa karena kurangnya kepedulian masyarakat dan pemerintah Desa Sukamanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya terhadap isu lingkungan di daerahnya menjadi awal mula dibentuknya Komunitas Raksa Lembur guna untuk menjadi wadah bagi pemuda dan masyarakat setempat dalam menangani isu lingkungan yang ada terutama mengenai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kurang baiknya dalam pengolahan sampah. Komunitas Raksa Lembur aktif melaksanakan program-

programnya dalam menangani isu lingkungan dengan mengkampanyekan gerakan bersih-bersih sehingga masyarakat setempat ikut andil dalam kegiatan tersebut.

Maka, dengan kehadiran Komunitas Raksa Lembur ini menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat setempat agar ikut aktif dalam menangani isu lingkungan. Komunitas ini menyadarkan warga dan pemerintah setempat mengenai betapa pentingnya mengenai isu lingkungan khususnya kebersihan lingkungan dari sampah. peneliti mengambil rumusan masalah mengenai bagaimana Komunitas Raksa Lembur dalam menangani isu lingkungan di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi contoh untuk komunitas lain dalam menangani isu lingkungan. Penelitian ini juga menggunakan teori gerakan sosial baru karena membahas mengenai isu lingkungan yang merupakan salah satu bagian dari gerakan sosial baru.